

**ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2013-2016**

Balthazar Kreuta¹

balthazarkreuta@feb.uncen.ac.id

Dhiar Dwi Atmaja²

Ida Ayu Purbariani³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal terhadap indek pembangunan manusia di Provinsi Papua dari tahun 2013 - 2016 dengan observasi 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder bersifat kuantitatif. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi data panel dengan model fixed effect yang menggunakan alat bantu pengolahan data dengan program aplikasi Eviews 9. Variabel dari penelitian ini adalah belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal sebagai variabel dependen, dan variabel indeks pembangunan manusia (IPM) adalah variabel independen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan variabel belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan indicator indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua. Hasil regresi menunjukkan bahwa sebesar 99,9011%. Artinya bahwa 99,9011% variasi Indeks Pembangunan Manusia IPM) di 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal). Sisanya sebesar 0,099% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Secara parsial variable belanja barang & jasa, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua yang ditunjukkan melalui (IPM). Sedangkan belanja pegawai berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Papua yang ditunjukkan melalui IPM.

Kata Kunci: Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan keharusan bagi kelangsungan hidup suatu negara. Mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh sebuah negara yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan Sumber Daya Manusia mencakup peningkatan kemandirian dan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kapasitas dasar menurut (Todaro, 2003) yang sekaligus merupakan tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi adalah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*selfsteem*), serta kebebasan (*freedom*). Kecukupan dalam hal ini merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini tercermin dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan.

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

² Alumni Magister Ilmu Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Badan Pusat Statistik mencatat IPM Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai 70,18, meningkat sebesar 0,36 dari tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2016 menempatkan Indonesia pada status pembangunan manusia “tinggi”. Capaian pembangunan manusia pada tingkat regional cukup bervariasi. IPM tertinggi di Indonesia dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,60, sedangkan capaian terendah adalah Provinsi Papua dengan IPM sebesar 58,05. Empat Provinsi tercatat telah memasuki status pembangunan manusia “tinggi” pada tahun 2016, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Banten. Dengan demikian, terdapat 12 Provinsi telah menyandang status pembangunan manusia “tinggi”. Sementara itu, sebagian besar provinsi masuk pada kategori pembangunan manusia “sedang” dan hanya tersisa satu Provinsi yang masih berada pada level “rendah”, yaitu Provinsi Papua.

Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan dalam bentuk alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (*Sarkoro dan Zulfikar, 2016*). Salah satu perangkat yang selama ini banyak digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan peran tersebut adalah perangkat kebijakan fiskal. Di antara instrumen kebijakan fiskal tersebut, ada instrumen dalam bidang pengalokasian dana atau anggaran pembangunan ke bidang yang berkaitan dengan dengan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, irigasi, transportasi, dan sebagainya (*Sasana, 2009*). Komponen anggaran pembangunan ini mencakup belanja-belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Komponen belanja tidak langsung itu yakni belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bagi hasil pajak pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, dan belanja tidak terduga. Sementara Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Apabila IPM mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Desentralisasi keuangan yang diberikan pemerintah tentunya memberi ruang untuk pemerintah dapat lebih bijak mengalokasikan dana anggaran daerah untuk keperluan pembangunan manusia di daerahnya masing-masing. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai. Perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, bahkan kultur yang dimiliki tiap daerah tentunya memerlukan penanganan yang berbeda. Sehingga dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing provinsi, tujuan pembangunan manusia melalui anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dapat tercapai. Masing-masing daerah otonom diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (*Putra, 2017*).

Suryati (2015) menguji Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007-2012 dengan hasil penelitian bahwa semua variable belanja baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Belanja pegawai berpengaruh negative dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan serta belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan.

Realisasi belanja APBD Provinsi Papua berdasarkan realisasi per pos menunjukkan penurunan pada seluruh pos belanja. Penurunan realisasi anggaran terdapat pada pos Belanja Modal, dari triwulan II 2016 mampu terserap hingga 19,19% menjadi hanya 0,05% pada triwulan laporan. Rendahnya penyerapan pos Belanja Modal juga ditunjukkan dari data pengadaan pekerjaan konstruksi di Provinsi Papua. Hingga periode laporan, ditunjukkan bahwa total senilai Rp2,6 triliun pekerjaan konstruksi telah dibuka proses pengadaannya atau jika dibandingkan dengan pagu Belanja Modal triwulan II 2017 mencapai 82,70%. realisasi pos Belanja Barang dan Jasa triwulan II 2017 sebesar 19,45% relatif lebih rendah dibandingkan triwulan II 2016 yang sebesar 22,58%. Penurunan ini juga dikonfirmasi dari rendahnya jumlah proses pengadaan barang dan jasa yang telah dimulai hingga triwulan laporan. Penurunan ini juga dikonfirmasi dari rendahnya jumlah proses pengadaan barang dan jasa yang telah dimulai hingga triwulan laporan. Jumlah proyek pengadaan barang dan jasa sampai akhir semester I 2017 sebanyak 284 proyek yang bersumber dari APBD. (KEKR BI, 2017)

Hingga saat ini, tantangan pembangunan manusia di Indonesia yang masih memerlukan perhatian serius adalah kesenjangan capaian pembangunan manusia antarwilayah. Kesenjangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di dalam provinsi masih relatif tinggi, terutama kesenjangan di Provinsi Papua. Kesenjangan pembangunan manusia antara kabupaten dengan kota juga menjadi persoalan penting. Ketimpangan yang mencolok juga terjadi antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kemajuan pembangunan di wilayah otonom. Kunci kebijakan untuk meningkatkan kemajuan serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah harus berprinsip pada hakikat pembangunan manusia (BPS 2014). Untuk itu, program pembangunan daerah harus direncanakan dengan baik dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas kehidupan manusia. Dari uraian diatas maka penting untuk mengetahui seberapa besar dampak anggaran pemerintah daerah terhadap peningkatan sumberdaya manusia di Provinsi Papua. Oleh karena itu penulis memilih judul “*Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah Ada Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016”, “Apakah Ada Pengaruh Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016”, “Apakah Ada Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016”, “Apakah Ada Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, Dan Belanja Modal Secara Serentak Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016”

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja pegawai terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di provinsi papua tahun 2013-2016 (2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja barang dan jasa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di provinsi papua tahun 2013-2016 (3) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di provinsi papua tahun 2013-2016 (4) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal secara serentak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di provinsi papua tahun 2013-2016.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Papua.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa realisasi belanja pegawai, realisasi belanja barang dan jasa, dan realisasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi

Papua tahun 2013-2016 yang penulis dapatkan melalui website Dirjen Perimbangan Keuangan yaitu <http://www.djpk.go.id>. Sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2013-2016 penulis peroleh dari website Badan Pusat Statistik yaitu <http://www.bps.go.id>, serta data – data dari literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dan digunakan dalam penelitian ini adalah Study Kepustakaan, dimana Penulis mengumpulkan data yang diperlukan melalui kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, surat kabar, jurnal, artikel di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Alat Analisis

Penelitian dengan menggunakan data panel dengan cross section 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan time series tahun 2013-2016. Untuk mengukur dan menentukan pengaruh belanja pegawai terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengaruh belanja barang dan jasa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Persamaan model data panel dengan menggunakan data *cross-section* adalah sebagai berikut:

$$y_t^k = \alpha + \beta_1 X_{1t}^k + \beta_2 X_{2t}^k + \beta_3 X_{3t}^k + e_t^k$$

Keterangan:

y_t^k	=	Indek Pembangunan Manusia
α	=	kostanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	koefisien regresi
X_{1t}^k	=	Belanja Pegawai
X_{2t}^k	=	Belanja Barang dan Jasa
X_{3t}^k	=	Belanja Modal
k	=	Wilayah ke “k”
t	=	Tahun ke “t”
e_t^k	=	error term atau residual

Analisis Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu belanja pegawai (X1), belanja barang & jasa (X2), dan belanja modal (X3) terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (Y) maka digunakan analisis koefisien determinasi (R^2).

Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R^2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

Uji Simultan

Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara serentak bahwa seluruh variabel independen yaitu belanja pegawai (X1), belanja barang & jasa (X2), dan belanja modal (X3) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (Y).

Kriteria pengujiannya apabila nilai F-statistik < F-tabel maka hipotesis ditolak yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F-statistik > F-tabel maka hipotesis diterima yang berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu.

Uji Parsial

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat pada hipotesis berikut: $H_0: \beta_1 = 0$ tidak berpengaruh. $H_1: \beta_1 > 0$ berpengaruh positif, $H_1: \beta_1 < 0$ berpengaruh negatif. Dimana β_1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y . bila t-statistik $>$ t-tabel maka H_0 diterima (signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Uji Chow

Pertama-tama data panel diestimasi menggunakan efek spesifikasi fixed. uji yang dilakukan yaitu uji Chow. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan *Fixed Effect* atau *Common Effect*.

Ho: *Common Effect*

Ha: *Fixed Effect*

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 5%, maka H_0 ditolak. Sehingga, Model menggunakan *Fixed Effect*. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi fixed adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil tes redundant fixed effect

Redundant Fixed Effects Tests		
Pool: POOL01		
Test cross-section fixed effects		
Effects Test	Statistic	Prob.
Cross-section F	2163.258	0.0000
Cross-section Chi-square	763.5287	0.0000

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan hasil di atas, probabilitas Chi-square = 0,0000 $<$ 0,05, maka H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa model yang lebih tepat adalah fixed effect dibandingkan common effect.

Uji Hausman

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik digunakan dari *Fixed Effect*.

Ho : *Random Effect*

Ha : *Fixed Effect*

Apabila hasil probabilitas chi-square lebih dari 5%, sebaiknya model menggunakan *Random Effect*. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi random adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: POOL01			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.

Cross-section random	17.15111	3	0.0007
-------------------------	----------	---	--------

Sumber : data diolah (2018)

Hasil probabilitas chi-square = 0,0007 < 0,05, maka H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian berdasarkan hasil uji Hausman menunjukkan bahwa model yang lebih tepat adalah *Fixed Effect* dibandingkan *Random Effect*. Mengikuti hasil uji model secara ke seluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat adalah *Fixed Effect*.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3. Hasil Uji f-hitung dan Koefisien Determinasi Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.999011	Mean dependent var	54.07905
Adjusted R-squared	0.998646	S.D. dependent var	11.90518
S.E. of regression	0.438082	Akaike info criterion	1.416129
Sum squared resid	16.12092	Schwarz criterion	2.175740
Log likelihood	-50.13547	Hannan-Quinn criter.	1.724487
F-statistic	2736.957	Durbin-Watson stat	1.317821
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai Koefisien Determinasi ditunjukkan pada tabel 3 nilai R-squared menunjukkan sebesar 0,999011 atau 99,9011%. Artinya bahwa 99,9011% variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat dijeaskan oleh variabel –variabel independen (belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal). Sisanya sebesar 0,099% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji Simultan (Uji F)

Adapun penjelasan mengenai hasil uji F yang terdapat pada tabel 3 dengan nilai F-hitung sebesar 2736.957 dan probabilitas F sebesar 0.000000. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian uji T dilakukan dengan menggunakan kriteria berdasarkan nilai t-statistik (t_{hitung}) dari masing-masing koefisien variabel independen dan berdasarkan probabilitas (ρ). Dalam penelitian ini, df (n-k) yang dihasilkan sebesar 112 (116-4), dimana n sebesar 116 adalah jumlah observasi dan k sebanyak 4 adalah jumlah variable dependen dan independen. Dengan nilai df sebesar 112 dan signifikan 0.05, maka nilai t-tabel adalah 1.65857.

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi t ($\alpha = 0,05$) Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	51.58293	0.204095	252.7399	0.0000
BP?	0.004072	0.002600	1.565935	0.1211
BBJ?	0.005437	0.000841	6.463904	0.0000
BM?	0.002202	0.000646	3.409553	0.0010

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 4 belanja pegawai (BP) dengan t_{hitung} sebesar 1.565935 dengan tingkat signifikan sebesar 0.1211. Hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1.565935 < 1.65857$) dengan nilai signifikan ($0.1211 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja pegawai (BP) tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 4 Belanja Barang dan Jasa (BBJ) dengan t_{hitung} sebesar 6.463904 dengan tingkat signifikan sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6.463904 > 1.65857$) dengan nilai signifikan ($0.0000 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Barang dan Jasa (BBJ) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 4 Belanja Modal (BM) dengan t_{hitung} sebesar 3.409553 dengan tingkat signifikan sebesar 0.0010. Hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3.409553 > 1.65857$) dengan nilai signifikan ($0.0010 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Persamaan Regresi Slope Sama

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa belanja pegawai (BP) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Pengaruh tersebut bersifat nyata dengan taraf signifikan 5% atau pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Nilai Koefisien regresi yang terdapat pada tabel 5.3 sebesar 0.004072 menunjukkan bahwa apabila variabel belanja pegawai (BP) meningkat sebesar 1 Miliar Rupiah, maka akan menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.004072 poin.

Variabel belanja barang dan jasa (BBJ) berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Pengaruh tersebut bersifat nyata pada taraf signifikan 1 persen. Koefisien regresi yang bersangkutan sebesar 0.005437 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel belanja barang dan jasa (BP) meningkat sebesar 1 Miliar Rupiah, maka akan menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.005437 poin.

Variabel belanja modal (BM) berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Pengaruh tersebut bersifat nyata pada taraf signifikan 1 persen. Koefisien regresi sebesar 0.002202 menunjukkan bahwa apabila variabel belanja modal (BM) meningkat sebesar 1 Miliar Rupiah, maka akan menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.002202 poin.

Pembahasan

1. Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Peningkatan Kualitas Sumberdaya Man usia Dengan Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pegawai (X_{1t}^k) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia (IPM) di Provinsi Papua tahun 2013-2016 dan apabila belanja pegawai (BP) meningkat sebesar 1 Miliar Rupiah, maka akan menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.004072 poin.

Hal ini sejalan dengan penelitian Deswanto dkk (2017) yang menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan tidak signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang diukur melalui IPM, mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pegawai belum diikuti dengan meningkatnya pelayanan public kepada masyarakat.

Dalam pengukuran indeks pembangunan manusia, dimana dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, maka ditentukan oleh jumlah tenaga dan kualitas guru

yang tersedia. Dalam dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup tentunya dipengaruhi oleh jumlah tenaga medis.

Berdasarkan data BPS (2016) Jumlah guru di Provinsi Papua pada tingkat SD/MI sebesar 18,294, SMP/MTs sebesar 8,128, dan SMA/SMK/MA sebesar 7,407. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yaitu tenaga medis sebesar 528, tenaga keperawatan sebesar 789, tenaga kebidanan sebesar 1,128, tenaga kefarmasian sebesar 1,794, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar 5,744.

Jumlah tenaga guru dan tenaga kesehatan di Provinsi Papua yang secara rasio telah mencukupi, namun masih menjadi persoalan dalam persebarannya. Persebaran tenaga belum merata, dimana lebih banyak di fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan perkotaan dibandingkan di wilayah yang jauh dari perkotaan.

2. Pengaruh Belanja Barang & Jasa Terhadap Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dengan Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel belanja barang & jasa berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia (IPM) di Provinsi Papua tahun 2013-2016 dan apabila belanja barang dan jasa meningkat sebesar 1 Miliar Rupiah, maka akan menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.005437 poin.

Hasil ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Suryati (2015) yang menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Kegiatan belanja barang dan jasa akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga terjadi kenaikan pada aktivitas masyarakat yang nantinya akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka tingkat kesejahteraannya akan semakin meningkat pula, sehingga masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Peningkatan pendapatan akan mampu untuk meningkatkan alokasi pendapatan dalam kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier sehingga masyarakat akan menjadi lebih sehat, lebih pintar dan lebih sejahtera. Apabila ketiga komponen ini terpenuhi maka secara otomatis akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia karena pendidikan, kesehatan maupun daya beli ini merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri.

3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dengan Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil analisis estimasi belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia (IPM) di Provinsi Papua tahun 2013-2016 dan jika peningkatan belanja modal (BM) sebesar 1 Miliar Rupiah, maka akan menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.002202 poin.

Hasil ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Zebua (2013), Denni (2012), Nurhikmah (2014), Noor dkk (2013) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan pada konsep IPM yang dibentuk dari 3 bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Maka, pembangunan melalui belanja modal pemerintah memang sangat diperlukan sebagai pendorong peningkatan IPM. Misalnya dibidang kesehatan, yakni ketika pemerintah membangun infrastruktur di bidang kesehatan. Karena, masyarakat mempunyai tempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ataupun tempat untuk berobat ketika sakit, sehingga hal tersebut menyebabkan indeks lama hidup masyarakat akan meningkat. Hal serupa ketika pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan diintensifkan pembangunannya di daerah-daerah. Hasil dari pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan memberikan peluang bagi daerah terpencil dan daerah terbelakang untuk meningkatkan taraf pengetahuan mereka. Begitupula, pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, laut dan udar, dan pabrik. Pembangunan infrastruktur tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Misalnya, bagi pelaku ekonomi dengan

dibangunnya infrastruktur tersebut, maka jumlah barang maupun jasa yang ditawarkan bertambah, kemudian lintas wilayah lebih luas, dan waktu tempuh yang singkat. Sehingga hal tersebut meminimalisir biaya-biaya yang dikeluarkan pelaku ekonomi dalam memasarkan produk mereka.

4. Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, Dan Belanja Modal Secara Serempak Terhadap Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil uji F yang terdapat pada tabel 5.1 dengan nilai F-hitung sebesar 2736.957 dan probabilitas F sebesar 0.000000. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Sedangkan Nilai Koefisien Determinasi ditunjukkan pada tabel 5.1 nilai R-squared menunjukkan sebesar 0,999011 atau 99,9011%. Artinya bahwa 99,9011% variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat dijawab oleh variabel –variabel independen (belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal). Sisanya sebesar 0,099% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Papua terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2016. IPM Provinsi Papua meningkat dari 54,45 pada tahun 2010 menjadi 58,05 di tahun 2016. Selama periode tersebut, IPM di Provinsi paling timur Indonesia yang rata-rata tumbuh sebesar 1,15 persen pada periode 2015-2016, IPM Papua tumbuh 1,4 persen dan menjadi Provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia. Meskipun demikian, dengan nilai IPM yang masih berada di bawah 60, pembangunan manusia Provinsi Papua masih berstatus “rendah”.

Angka harapan hidup saat lahir menggambarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua pada tahun 2014 hanya sebesar 64,84 tahun, dan pada tahun 2016 AHH Provinsi Papua naik menjadi 65,12 tahun. Dengan demikian Provinsi Papua telah berhasil meningkatkan AHH sebesar 0,28 tahun.

Pada dimensi pengetahuan yang dibentuk oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator tersebut berdasarkan pada tabel 5.5 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2014 hingga 2016, HLS meningkat 0,29 tahun, sementara RLS meningkat sebesar 0,39 tahun.

Dimensi lainnya yang mewakili kualitas hidup manusia adalah Standar Hidup Layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2016 pengeluaran per kapita masyarakat Papua mencapai Rp 6,63 juta per tahun.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai bersifat positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja pegawai belum efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua tahun 2013-2016 yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Belanja barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua, Artinya jika belanja barang dan jasa meningkat maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja barang dan jasa efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua tahun 2013-2016.
3. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui indikator indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua, artinya jika belanja modal meningkat maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja modal efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua tahun 2013-2016.

4. Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan variabel belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua. Hasil uji determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 99,9011%. Artinya bahwa 99,9011% variasi Indeks Pembangunan Manusia IPM) di 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat dijelaskan oleh variabel –variabel independen (belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal).

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan diatas, berikut dikemukakan beberapa saran yang dapat digunakan untuk beberapa pihak, yaitu bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah rentang waktu yang lebih panjang sehingga nantinya diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih baik dan untuk memperluas penelitian serta menghasilkan analisis yang lebih baik.

Bagi Praktis, dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan dan memaksimalkan alokasi belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal agar Kabupaten atau Kota dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari angka indeks pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- BI. 2017. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua. Diambil Pada Hari Jumat 23 Februari dari www.bi.go.id;
- BPS. 2014. Indeks Pembangunan Manusia. Diambil Pada Hari Jumat 23 Februari dari www.bps.go.id
- Daryanto, A dan Hafizrianda, Y. 2010. Model-Model Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi. PT Penerbit IPBPress. Bogor;
- Denni, S.M. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Jawa Tengah;
- Deswantoro, Dkk. 2017. Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Universitas Tanjungpura. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Achmad Yani. Bandung. Kewirausahaan. Vol.6. No 3, 187-210;
- Noor, dkk. 2013. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol 3, No 2;
- Nurhikmah, A.H. Pengaruh PDRB, Kemiskinan, dan Belanja Modal Terhadap Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta;
- Pangke, Bella, C. A.; Urip, Transna, P.; Marbun, Robert, M. W. S. T. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kota Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume V No. 3, Desember 2018;
- Putra, Z. 2017. Analisis Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu. Sulsel. Jurnal Riset Edisi XIV Program Studi Ekonomi Pembangunan;
- Sarkoro, H. 2016. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap IPM. Riset Akuntansi dan Keuangan Daerah. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jawa Tengah;
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni, 2009;
- Sumiyati, Euis Eti. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. Universitas Jenderal Achmad Yani;
- Suryati, D. 2015. Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia. Universitas Nahdlatul Wathan Mataram. Volume 9, No. 7;

- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminnudin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- UNDP. 1990. "Human Development Report" United Nations Development Programme. New York
- Website Dirjen Perimbangan Keuangan. <http://www.djpk.go.id>;
- Zebua, W.F. 2013. *Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.